

Strategi Pembangunan Infrastruktur Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang

Oleh:

Ahmad Mufarrihun.

Program Studi Administrasi Publik STISIP Banten Raya

E-mail: Mufarrihun@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur (Studi Penelitian Pembangunan Infrastruktur di Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang)”. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Kajian ini mendapati bahwa pemerintah desa selalu berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menunjang pembangunan. Hal ini terlihat pada pemerintah desa dalam merealisasikan jalan desa selalu melibatkan peran serta warga baik itu tokoh masyarakat, lembaga desa maupun masyarakat untuk berswadaya baik material, tenaga maupun tenaga ahlinya. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan adalah belum sepenuhnya warga di Desa Mandalasari menyadari akan kewajibannya, masih adanya beberapa warga yang kadang mempengaruhi untuk menentang program pembangunan di desa.

Kata Kunci: Strategi Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa

A. Pendahuluan

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Bangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil

yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Pembangunan infrastruktur termasuk kedalam pembangunan fisik dan sudah sejak lama diketahui bahwa keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang. Disamping sebagai alat yang dapat menghubungkan antar daerah di Indonesia, infrastruktur yang biasa sering disebut sebagai sarana dan prasarana fisik ini, memiliki keterkaitan yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Salah satu program dengan pelibatan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan). Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan PNPM mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Yang telah dilaksanakan sejak 1998 PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Telah melaksanakan program PPIP yang dimulai pada tahun 2007 sampai tahun 2012. PPIP berupaya menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan desanya sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan di bawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong peran serta masyarakat

dalam pelaksanaan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan dan dalam proses pembangunan. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan membahas bagaimana strategi Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa dan penghambat pembangunan infrastruktur Desa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang terjadi secara sistematis, aktual, dan akurat. Sesuai dengan fakta yang ada dengan mengumpulkan data, menjelaskan dan melakukan analisa secara obyektif dalam arti hasil penelitian ini akan lebih menekankan pada gambaran mengenai obyek penelitian yang sebenarnya.

Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk menyusun gambaran mengenai obyek yang diteliti dengan terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data-data di lokasi penelitian, lalu data tersebut diolah dan diartikan untuk kemudian dapat melakukan analisa dan interpretasi dari data yang telah disajikan

C. Konsep Administrasi Pembangunan dan Strategi

Pengertian Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Administrasi Pembangunan menggunakan dua fungsi yaitu Pembangunan Administrasi dan Administrasi Pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa dan pembangunan sosial.

Menuru Sondang P.Siagian mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perobahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Edward W. Weidner lebih spesifik merumuskan sebagai berikut Administrasi Pembangunan menggambarkan sebagai suatu pengembangan yang

administratif dan administrasi dalam program pengembangan. Menurut Paul Meadows dalam bukunya "Motivation For Change and Development Administration, 1968:86 mendefinisikan Administrasi Pembangunan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengatur masyarakat dibidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik.

Dari pendapat beberapa ahli diatas, maka dapat saya ambil pemahaman bahwa administrasi pembangunan adalah segala dan segenap suatu proses yang akan dilakukan dan akan dilaksanakan oleh administrator dalam rangka upaya untuk mendorong dan untuk memberikan suatu pengawasan terhadap masyarakat ke arah modernisasi dan kebaikan yang multi-dimensional secara terpadu dan administratif.

Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Strategi sebenarnya proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dan suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi, pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Marrus (2002), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Quinn (1999), mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dari kedua pendapat diatas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Goldworthy dan Ashley (1996), mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut :

- a. Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang.
- b. Arah strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya.

- c. Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan.
- d. Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
- e. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal.
- f. Fleksibilitas adalah sangat esensial.
- g. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.

Strategi itu sendiri biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategi, dimana strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi secara umum akan gagal, pada saat organisasi tidak memiliki konsistensi antara apa yang dikatakan, apa yang di usahakan dan apa yang dilakukan.

D. Strategi Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur

Fokus utama yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi dan cara berpikir masyarakat yang tidak terbatas pada, golongan elit saja, melainkan secara menyeluruh dan merata sampai lapisan masyarakat lapisan terbawah. Pembangunan semacam ini biasanya secara nyata diwujudkan dalam kegiatan memberikan perlengkapan hidup material seperti pangan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan meningkatkan keamanan masyarakat berdasarkan pada realitas, sosial. Dari sinilah yang kemudian menjadikan hal yang penting peranan Pemerintah Desa, sehingga perannya diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan program dan perencanaan pembangunan Desa. Program yang sudah berjalan di Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang yaitu ada jalan paving blok dan drainase.

Berdasarkan strategi pembangunan yang telah diuraikan tersebut, setelah menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai unsur yang meliputi masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya, maka telah ditetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2019. Program-program pembangunan yang telah ditetapkan pada hakekatnya merupakan garis-garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai sasaran jangka pendek. Sehingga secara kumulatif selama lima tahun ke depan akan terwujudlah visi dan misi desa. Dalam agenda pokok pembangunan, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Pemerintahan desa, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan pembangunan di daerahnya. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa. *“Proses koordinasi mengenai strategi pembangunan desa yang harus di terapkan dalam keseluruhan proses pembangunan desa sejak awal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan sampai dengan evaluasinya”*.

Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) undang-undang nomor 6 tahun 2004 merupakan panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa selama kurun waktu lima tahu kedepan. Oleh karena itu, substansi RPJM Desa mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan desa, dan meliputi seluruh fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sesuai dengan cakupan kewenangan yang ada pada pemerintah desa. Bapa Kepala Desa menyatakan *“Menurut saya, strategi pemerintah desa dalam pembangunan di desa Mandalasari sudah cukup baik. Kerena ada pasilitas yang sudah dibangun yaitu jalan pavingblok dan drainase”*.

E. Pemerintahan Desa yang Transparan, Bertanggung jawab, dan Responsif

Berbagai hal yang diuraikan di atas pada intinya adalah otonomi desa yang sesungguhnya, yaitu wewenang berada pada rakyat yang tinggal di desa tersebut, bukan otonomi pemerintahan desa, dan juga bukan otonomi bagi desa dalam pengertian suatu wilayah atau teritori tertentu di tingkat lokal. Karenanya, pemerintahan desa harus dapat membuka ruang bagi seluruh komponen masyarakat untuk dapat terlibat dalam seluruh proses pembangunan. Pelibatan tersebut membutuhkan beberapa syarat awal yang harus di implementasikan oleh pemerintahan desa sendiri, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Menurut hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Mandalasari yaitu, *“Pembangunan di Desa Mandalasari sudah dilakukan dengan baik keterbukaan terhadap masyarakat tentang dana desa program yang akan dilakukan semua di musyawarahkan dalam acara musrembang Desa”*

Untuk mewujudkannya dalam pelaksanaan administrasi publik sehari-hari, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, kondisi masyarakat yang apatis terhadap program-program pembangunan selama ini membutuhkan adanya upaya-upaya khusus untuk mendorong keingintahuan mereka terhadap data atau informasi ini. Untuk itu, dibutuhkan adanya penyebarluasan (diseminasi) informasi secara aktif kepada seluruh komponen masyarakat, tidak bisa hanya dengan membuka akses masyarakat terhadap

informasi belaka. Kedua, pemilihan media yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi dan substansi atau materi informasi yang disebarluaskan sangat bergantung pada segmen sasaran yang dituju. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat awam sangat berbeda dengan yang dibutuhkan oleh organisasi nonpemerintahan desa, misalnya. Selain itu, seringkali cara-cara dan media yang sesuai dengan budaya lokal jauh lebih efektif dalam mencapai sasaran daripada “media modern”. Ketiga, seringkali berbagai unsur non pemerintahan misalnya lembaga keagamaan, lembaga adapt, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lebih efektif untuk menyebarluaskan informasi daripada dilakukan pemerintahan desa sendiri. Untuk itu itu, penginformasian kepada berbagai komponen strategis ini menjadi sangat penting. Menurut hasil wawancara dari kasi pembangunan di Desa Mandalasari penulis memperoleh jawaban yaitu, *“Implementasi dari pembangunan memberikan hasil pada masyarakat yang berupa dokumentasi kegiatan pembangunan serta musyawarah pada masyarakat”*. Sedangkan salah satu warga mengatakan *“Menurut saya belum maksimal, karena masyarakat mengeluh belum adanya bak sampah. Oleh karena itu saat saya datang langsung datang ke desa dan meminta langsung ke Kepala Desa Mandalasari untuk dibuatkan bak sampah”*

Kepala Desa Mandalasari mengatakan *“ Dengan adanya dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembuatan sarana dan prasarana infrastruktur desa. Kemandirian masyarakat sudah bisa dirasakan di Desa kami, mereka sudah bisa meningkatkan kemandirian masing-masing tanpa harus melibatkan banyak orang untuk membantu”*.

F. Faktor Penghambat Pembangunan Infrastruktur Desa

Namun saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan masih mengalami kendala. Yaitu dari lahan masyarakatnya yang masih sengketa dan ada yang mengijinkan ada yang tidak serta. Saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah pedesaan umumnya masih terkendala oleh terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desanya, hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa terkait masalah pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah terlihat hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan. Sehingga yang terjadi desa dipaksa untuk menerima program pembangunan dari pemerintah tanpa melihat pembangunan apa yang sesungguhnya dibutuhkan desa tersebut. Permasalahan tersebut menjadikan masyarakat kemudian

menganggap pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan pada desa mereka hanya sebatas hadiah yang diberikan pemerintah dan bukanlah kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat. Menurut Kasi Pembangunan desa mandalasari penulis memperoleh jawaban yaitu : *“Sengketa lahan, ini salah satu kendala pada saat pembangunan infrastruktur ingin dilaksanakan. Adanya masyarakat yang tidak memperbolehkan lahan nya dipakai untuk pembangunan di desa”*.

Strategi ini merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi pemerintah desa dalam menetapkan tujuan pemerintah memberdayakan masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat di desa. Bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Berdasarkan strategi pembangunan yang telah diuraikan tersebut, setelah menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai unsur yang meliputi masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya, maka telah ditetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2019.

Adapun PPIP atau program pembangunan infrastruktur perdesaan bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat, melalui partisipasi dalam memecahkan permasalahan yang terkait kemiskinan dan ketertinggalan desa. Dari sinilah yang kemudian menjadikan hal yang penting peranan Pemerintah desa, sehingga peranannya diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan program dan perencanaan pembangunan desa. Program yang sedang berjalan di desa mandalasari kecamatan kaduhejo kabupaten pandeglang yaitu PTSL atau penerbitan sertifikat tanah. Dan program pembangunan yang sudah berjalan ada pembuatan jalan paving blok dan drainase. Menurut kepala desa mandalsari anggaran untuk pembangunan desa yaitu 700 sampai 800 juta.

G. Kesimpulan

Kesimpulan peranan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh bagi pembangunan diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur di desa sesuai dengan program dan perencanaan pembangunan desa. Program yang sedang berjalan ada PTSL atau pembuatan sertifikat

tanah. Adapun program yang sedang berjalan di Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang yaitu pembuatan pembangunan jalan paving blok dan drainase.

Tujuan dari pembangunan tersebut yaitu untuk memberdayakan masyarakat, membuat jalannya perekonomian dengan lancar sehingga masyarakat di Desa bisa sejahtera. Namun saat pembangunan infrastruktur akan dilakukan masih mengalami kendala. Yaitu dari lahan masyarakatnya yang masih sengketa dan ada yang mengizinkan ada yang tidak serta mengizinkan. Saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah pedesaan umumnya masih terkendala oleh terbatasnya akses masyarakat pedesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desanya, hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa terkait masalah pembangunan yang akan dilakukan pemerintah desa terlihat hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan.

Permasalahan pembangunan yang muncul di daerah pedesaan, dapat ditanggulangi dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu faktor pendukungnya yaitu partisipasi masyarakat saat perencanaan pembangunan infrastruktur, pembebasan lahan, dan anggaran yang cukup. Dengan perbaikan infrastruktur yang ada di desa berdasarkan hal tersebut, pemerintah mulai memperkenalkan program pembangunan yang melibatkan masyarakat dimulai dari tahapan pengusulan kegiatan sampai dengan pemeliharannya.

Daftar Pustaka

Bryson, Jhon. M. (2007). *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Sosial*.

Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Inu Kencana Syafii. (2003). *Sistem Administrasi Negara*. PT Bumi Aksara .

Duaji. (1996). *Administarasi Pembangunan*.Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

H.B Sutopo. (1988). *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta:Pusat Penelitian UNS.

Marwan, Ja'far. (2007). *Infrastruktur Pro Rakyat: Strategi Investasi Infrastruktur Indonesia Abad 21*. PT LKiS Pelangi Aksara

Siagian, P. Sondang. (2008). *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Bumi Aksara, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintaro. (1994) *Perencanaan Pembangunan*. CV. Haji Masagung

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Undang-Undang No.6 Tahun 2004.